

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Ghufroh, Sudarsono, 1990, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Edwin, B. Filoppo, 1986, *Manajemen Personalia*, Jilid I, Edisi IV, Erlangga, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1995, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1994, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Haji Masgung, Jakarta.
- Melayu, S. P. Hasibuan, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Peter Salim Dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 1996, *Hukum Kepegawaian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastra Djatmika Dan Marsono, 1990, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1992, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja A.W, 1995, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wuranto I.C. 1990. *Manajemen Kepegawaian I. Kajian Sumber*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyelenggaraan Diklat.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Perubahan I Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 38/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kerjasama